

**UPAYA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA PASCA COVID-19
MELALUI FORUM DIGITAL ECONOMY WORKING
GROUP (DEWG) G20**

Oleh: Ali Hanafi Arif

Email: alihanafi261@gmail.com

Pembimbing: Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has significantly impacted global economies, including Indonesia, causing economic disruptions across various sectors, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). As a response, Indonesia leveraged its presidency at the G20 in 2022 to promote digitalization through the Digital Economy Working Group (DEWG). This research explores Indonesia's efforts in utilizing the DEWG as a platform for economic recovery by focusing on three key priorities: Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Literacy and Skills, and Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Using a qualitative-descriptive method, this study analyzes Indonesia's strategy in proposing digitalization as a critical recovery pathway and how these efforts align with its national interests and G20 commitments. The research also evaluates the outcomes of the DEWG, particularly the Bali Package, a consensus document encompassing recommendations and strategies for inclusive and sustainable digital transformation.

Findings reveal that Indonesia's presidency successfully spotlighted the strategic importance of digital connectivity in addressing economic challenges post-pandemic. Initiatives such as expanding digital infrastructure, promoting digital literacy programs, and advocating for secure cross-border data flow demonstrated Indonesia's proactive diplomacy and leadership within the G20. Furthermore, the DEWG provided a platform for Indonesia to champion the interests of developing countries while facilitating collaborative solutions for global digital transformation.

Keywords: *G20, Digital Economy Working Group, digital transformation, Indonesia, digital diplomacy, MSMEs, global economy*

PENDAHULUAN

Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bermula di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 telah berdampak besar secara global, termasuk di Indonesia. Perekonomian nasional melambat, dengan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi menjadi yang paling terdampak.

Kebijakan pembatasan sosial dan isolasi mandiri menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Akibatnya, banyak individu kehilangan sumber penghasilan, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja meningkat akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, sehingga turut berkontribusi terhadap kenaikan angka pengangguran.

Selain itu, pandemi juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha domestik, terutama UMKM, yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan secara drastis. Demi bertahan di tengah keterbatasan mobilitas fisik, UMKM mulai beralih ke pasar digital dengan memanfaatkan platform pemasaran online dan strategi digital marketing guna mempertahankan bisnis serta meningkatkan pendapatan. Teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adaptif, memungkinkan mereka tetap beroperasi meskipun dalam kondisi pandemi.

Lonjakan signifikan dalam penggunaan internet ini sebagian besar disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mendorong

masyarakat untuk lebih bergantung pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan transaksi ekonomi. Menanggapi tren ini, Indonesia melihat peluang besar dalam transformasi ekonomi digital sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Roma, Italia, Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai Presidensi G20 pada 31 Oktober 2021, dengan serah terima kepemimpinan dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, kepada Presiden Joko Widodo. Dalam periode ini, Indonesia mengangkat tema utama yang berfokus pada pemulihan global di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono, menjelaskan bahwa tema ini bertujuan untuk mendorong pemulihan bersama di berbagai sektor, sekaligus memastikan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Salah satu kelompok kerja dalam G20 yang menjadi fokus utama Indonesia adalah *Digital Economy Working Group* (DEWG). Kelompok kerja ini berada dalam *Sherpa Track* G20 dan berfungsi sebagai wadah bagi perwakilan negara-negara anggota G20 untuk berdiskusi dan mengajukan konsep-konsep terkait kebijakan digital di sektor ekonomi.

Dalam forum DEWG G20 2022, terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus utama diskusi, yaitu *Connectivity and Post-COVID-19 Recovery*, *Digital Literacy and Skills*, dan *Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust*. Ketiga isu

tersebut saling berkaitan dalam mendukung percepatan transformasi digital di tingkat global.

Indonesia, sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah DEWG G20, memiliki peluang strategis untuk memanfaatkan forum ini sebagai ajang kerja sama dengan negara-negara G20 dalam menyusun kebijakan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Dengan demikian, melalui DEWG, Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional dalam ekonomi digital tetapi juga memainkan peran aktif dalam merancang arah kebijakan digital global.

Fenomena ini menjadi motivasi utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia dalam memanfaatkan forum DEWG sebagai salah satu strategi utama dalam percepatan transformasi digital ekonomi guna mendukung pemulihan pasca-COVID-19.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisis Negara-Bangsa

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tingkat analisa Negara-Bangsa yang mana menjelaskan tentang perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut, negara selaku aktor hubungan internasional dalam menjalankan aktivitasnya

diwakili oleh pemerintah yang berkuasa.¹

Konsep Komunitas Epistemik

Penelitian ini menggunakan konsep Komunitas Epistemik. Dalam teori ilmu Hubungan Internasional, komunitas epistemik pertama kali diperkenalkan oleh John Ruggie dan kemudian disempurnakan oleh Peter M. Haas. Menurut Haas komunitas epistemik adalah aktor penting yang muncul dan memiliki tanggung jawab untuk membangun juga menyebarkan ide kausal dan beberapa keyakinan normatif, dengan demikian mereka dapat membantu untuk membentuk kepentingan dan preferensi negara sebagaimana membantu untuk mengidentifikasi *legitimate participants* dalam proses kebijakan. Mereka juga memengaruhi hasil (*outcomes*) negosiasi, dengan membentuk bagaimana konflik kepentingan akan di selesaikan.²

Secara umum, komunitas epistemik merupakan sekumpulan ahli yang memiliki pengetahuan yang kemudian mereka gunakan untuk membentuk pemahaman aktor-aktor yang terlibat dan untuk memandu jalanya pengambilan keputusan atau kebijakan. Komunitas epistemik juga memiliki banyak fungsi, Haas memaparkan bahwa terdapat empat fungsi komunitas epistemik, antara lain;

Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional menjadi kerangka utama dalam

¹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Depok: Kenacana, Hlm. 187

² Haas, Peter M., 1992, *Epistemic Communities and International Policy*

Coordination. International Organization. World Peace Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.

penelitian ini, di mana negara-negara menjalin kolaborasi untuk mencapai kepentingan bersama. James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr dalam karyanya *Contending Theories of International Relations*, menjelaskan bahwa kerjasama internasional adalah sebuah upaya pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan dengan berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (dengan negara lain).³

Kerjasama internasional dilakukan karena adanya kepentingan bersama dalam bidang tertentu seperti sosial, ekonomi, hingga politik. Holsti berpendapat bahwa, kerjasama atau kolaborasi dimulai karena beragamnya isu nasional, regional, dan global yang membutuhkan perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah melakukan pendekatan dengan menawarkan untuk menyelesaikan masalah, membuat kesepakatan, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pandemi pada Ekonomi Indonesia

³ Dougherty. James E., Pfaltzgraff. Robert L, Jr, 1997, *Contending Theories of International Relations*, Happer and Row Publisher, New York, hlm. 418

⁴ K.J. Holsti, 1988, "Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis", Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta, Airlangga, hlm. 652

⁵ International Labour Organization. 2021. *World Employment and Social Outlook*:

Pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidakstabilan pasokan barang dan lonjakan harga, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁵

Tabel Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2017-2022

Tahun	PDB Per Kapita	Total	Pertumbuhan
2017	\$3,839	\$1,02 Triliun	+5,07%
2018	\$3,902	\$1,04 Triliun	+5.17%
2019	\$4,151	\$1,12 Triliun	+5.02%
2020	\$3,895	\$1,06 Triliun	-2.07%
2021	\$4,334	\$1,19 Triliun	+3.70%
2022	\$4,788	\$1,32 Triliun	+5.31%

Sumber: World Bank⁶

Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari tahun 2017 hingga 2019, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebesar 5% setiap tahun.

Namun, saat pandemi melanda pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar 2% dari PDB Indonesia selama satu tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih sepenuhnya, dengan PDB hanya

Trends 2021.

<https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/lang--en/index.htm>. Diakses pada 5 Oktober 2023.

⁶ World Bank. 2023. GDP per capita (current US\$) - Indonesia. Diakses dari: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GD.P.PCAP.CD?end=2022&locations=ID&most_recent_year_desc=false&start=2016. (Diakses pada 28 Agustus 2023)

meningkat sebesar 3,70%. Pada tahun 2022, PDB Indonesia kembali mencapai angka pertumbuhan 5% saat kebijakan pembatasan sosial secara bertahap mulai dilonggarkan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan luar biasa bagi berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama sektor UMKM, pariwisata, dan ekspor.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menyumbang sekitar 61,97% dari total PDB Indonesia pada tahun 2020, meskipun dalam kondisi krisis.⁷ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 163.713 UMKM terdampak secara langsung akibat pandemi.⁸ Sektor usaha perdagangan dan kuliner menjadi yang paling terpukul, dengan 87% UMKM di sektor ini mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50% mengalami penurunan pendapatan

Sektor UMKM merupakan salah satu sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia, mencapai 96,9% dari total tenaga kerja nasional.⁹ Dengan penurunan omzet yang drastis, banyak UMKM tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pekerjanya, sehingga

menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,6 juta pekerja kehilangan pekerjaan selama pandemi, akibat bangkrutnya perusahaan atau kebijakan pemangkasan tenaga kerja.¹⁰

Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara turun dari 16,11 juta pada 2019 menjadi hanya 4,02 juta pada 2020, yang berarti terjadi penurunan sebesar 75%.¹¹ Pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan internasional, serta kebijakan lockdown di berbagai negara membuat sektor ini mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 418,5 triliun pada tahun 2020. Akibatnya, sebanyak 2,8 juta tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan.¹²

Dampak pandemi juga dirasakan dalam sektor ekspor. Gangguan rantai pasok global menyebabkan turunnya permintaan produk ekspor Indonesia, terutama komoditas yang terkait dengan industri manufaktur dan pertanian. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga ekspor dan menurunnya kontribusi

⁷ Putra, A. C. 2022. Pengaruh Pertumbuhan PDRB Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, Hlm. 139.

⁸ Amri, A, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, *Jurnal Brand*, 2:1, Diakses dari <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>, Hlm. 123-130

⁹Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Diakses dari ekon.go.id:

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

Diakses pada 27 September 2023
¹⁰ Badan Pusat Statistik. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. Berita Resmi Statistik No.35/05/Th. XXV, 5 Mei 2023. Hlm. 13

¹¹ Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Pariwisata Indonesia*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>. (Diakses pada 18 Februari 2025)

¹² Ibid.

ekspor terhadap perekonomian nasional.

Peran Digitalisasi dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor ekonomi, terutama di Indonesia. Pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi konvensional telah mendorong pergeseran ke ekonomi digital sebagai strategi utama dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Digitalisasi ekonomi mencerminkan peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Pengguna layanan internet di Indonesia mengalami lonjakan dari 171,1 juta pada tahun 2018 menjadi lebih dari 210 juta pada tahun 2022.¹³ Peningkatan ini terutama didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih ke layanan daring untuk aktivitas sehari-hari, seperti belanja, pendidikan, dan pekerjaan.

Seiring dengan meningkatnya akses internet, pelaku usaha mulai mengadopsi berbagai teknologi digital, seperti *e-commerce*, layanan pembayaran digital, serta strategi pemasaran berbasis digital. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi

dengan beralih ke platform digital. Menurut laporan APJII, jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi digital mengalami peningkatan signifikan, dari 8 juta pada tahun 2019 menjadi 17,2 juta pada tahun 2022, yang mencerminkan lonjakan lebih dari 100%.¹⁴ Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi strategi utama bagi UMKM dalam mempertahankan bisnisnya di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.

Pasar digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, meskipun kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional masih tergolong kecil, pertumbuhannya menunjukkan tren yang signifikan. Pada tahun 2021, ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai Rp980 triliun, yang setara dengan 5,7 persen dari total PDB. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, PDB Indonesia akan mencapai Rp24 ribu triliun, dengan ekonomi digital berkontribusi sekitar 18 persen atau sekitar Rp4.531 triliun terhadap total PDB nasional.¹⁵

Dalam laporan E-Conomy SEA 2022 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia tercatat sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital

¹³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2022. Survei Profil Internet Indonesia 2022, Diakses dari <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>, hlm. 10. (Diakses pada 25 Januari 2023)

¹⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2023. Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Indonesia. Diakses dari <https://apjii.or.id>. (Diakses pada 20 Februari 2025)

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2022. Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita>, (Diakses pada 6 September 2023)

Indonesia atau *Gross Merchandise Value* (GMV) mencapai USD 70 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.¹⁶

Pergeseran perilaku konsumen selama pandemi COVID-19 turut mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek ekonomi. Dengan jumlah pengguna internet yang telah melampaui 210 juta orang pada tahun 2022, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memimpin transformasi digital di kawasan Asia Tenggara.¹⁷

Meskipun digitalisasi telah membawa manfaat yang besar bagi pemulihan ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana akses terhadap infrastruktur digital masih belum merata.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur digital yang masif, seperti proyek Palapa Ring dan perluasan jaringan 4G ke daerah terpencil.¹⁸

Hingga Januari 2022, 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi, dengan target 40 juta pada 2024 melalui program UMKM Go Digital dan PP No. 7 Tahun 2021.¹⁹

Melalui inisiatif *Making Indonesia 4.0*, pemerintah juga aktif mendukung sektor industri agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat ekosistem UMKM dan *e-commerce* melalui penyederhanaan perizinan, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, serta reformasi dalam lingkungan berusaha melalui UU Cipta Kerja.²⁰

¹⁶ Davis, S., Saini, S., Sipahimalani, R., Hoppe, F., Lee, W., Girona, IM., Choi, C., Smittinet, W, 2019. *e-Conomy SEA 2019: Swipe up and to the right: Southeast Asia's \$100 billion internet economy*. Google, Temasek & Bain Mobile, Consumer Insight. Diakses dari <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-conomy-sea-2019-swipe-up-and-to-the-right-southeast-asias-100-billion-internet-economy/>, Hlm. 4

¹⁷ Google, Temasek, & Bain. 2022. *E-Conomy SEA 2022 Report Highlights*, https://services.google.com/fh/files/misc/indonesia_e_conomy_sea_2022_report.pdf, Hlm. 12 (diakses pada 19 Oktober 2023)

¹⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Menko Airlangga: Pemerintah Inisiasi Berbagai Kebijakan Mendukung Pengembangan Talenta Digital*. Diakses dari [ekon.go.id: https://ekon.go.id/publikasi/detail/4505/men](https://ekon.go.id/publikasi/detail/4505/men)

ko-airlangga-pemerintah-inisiasi-berbagai-kebijakan-mendukung-pengembangan-talenta-digital (Diakses pada 28 November 2023)

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. *Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM hingga Pemerintah Daerah*. Diakses dari [kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/0/berita](https://www.kominfo.go.id). (Diakses pada 31 Oktober 2023)

²⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Berperan sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking*. Diakses dari [ekon.go.id: https://ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung](https://ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung)

Selain inisiatif domestik, Indonesia memanfaatkan kepemimpinan di G20 2022 untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, guna mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Digitalisasi Ekonomi dalam Forum G20

Sebagai forum ekonomi terbesar di dunia, G20 berperan strategis dalam membahas dan merumuskan kebijakan ekonomi global, termasuk digitalisasi ekonomi. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1999, G20 telah menjadi platform utama bagi negara-negara dengan perekonomian terbesar untuk berdiskusi mengenai tantangan global dan menciptakan solusi kolektif.²¹

Dalam beberapa tahun terakhir, isu transformasi digital semakin mendapat perhatian dalam G20, terutama karena meningkatnya peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi telah terbukti mempercepat produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan model bisnis baru yang lebih inklusif. Dalam berbagai pertemuan, G20 telah menekankan pentingnya digitalisasi sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Pada pertemuan G20 di Hangzhou, Tiongkok, tahun 2016, ekonomi digital pertama kali diakui sebagai salah satu faktor utama dalam pertumbuhan global, yang kemudian diikuti oleh pembentukan *Digital Economy Task Force* (DETF). Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kebijakan digital di antara negara-negara anggota dan membangun kerangka kerja yang lebih konkret untuk mendukung transformasi digital di tingkat global. Sejak saat itu, isu digitalisasi terus berkembang dalam agenda G20, mencakup aspek konektivitas digital, literasi digital, keamanan siber, serta pengelolaan data lintas batas.²²

Sebagai respons terhadap meningkatnya urgensi isu digital dalam perekonomian global, negara-negara G20 menyepakati peningkatan status *Digital Economy Task Force* (DETF) menjadi *Digital Economy Working Group* (DEWG) pada pertemuan G20 di Italia tahun 2021.²³ Elevasi ini mencerminkan pengakuan bahwa ekonomi digital tidak lagi hanya menjadi sub-topik diskusi, tetapi telah berkembang menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi global yang memerlukan pendekatan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebelumnya, DETF berperan sebagai forum diskusi informal di dalam G20, membahas berbagai isu yang berkaitan dengan kebijakan

kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking (Diakses pada 28 November 2023)

²¹ Hermawan, Y. 2010. *Formalizing the G20 outreach contact groups and civil G20*. Dalam Thomas, & P. Wolf, *G20 and Global Development*, Hlm. 32

²² G20 Research Group. (2016). *G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative*, 2016 Hangzhou Summit.

University of Toronto. Diakses dari G20 Information Centre:

<http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-digital.html> (Diakses pada 17 April 2024)

²³ G20 Information Centre. 2021. *G20 Digital Economy Ministers Meeting Declaration 2021*. Diakses dari <https://www.g20.utoronto.ca/2021/210805-digital.html#annex3>. (Diakses pada 18 Januari 2024).

digital. Namun, peran ini dinilai belum cukup efektif dalam menghasilkan kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kompleksitas tantangan digitalisasi global, negara-negara G20 mengusulkan pembentukan kelompok kerja permanen (*working group*) yang lebih terstruktur, sehingga isu ekonomi digital dapat memperoleh perhatian lebih besar dan menghasilkan kebijakan yang lebih strategis dan operasional.

Elevasi DETF menjadi DEWG memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kelompok kerja ini kini memiliki mandat resmi dalam G20, yang berarti bahwa isu-isu digital akan menjadi bagian permanen dari agenda ekonomi global. Kedua, negara-negara anggota memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menyusun kebijakan dan mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan DEWG. Ketiga, DEWG memungkinkan keterlibatan lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional, dalam menyusun kebijakan digital yang lebih inklusif.

Sebagai bagian dari G20, DEWG memiliki peran utama dalam mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa pengembangannya berlangsung dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, DEWG melanjutkan komitmen dari kepresidenan G20 sebelumnya serta menyusun agenda

tahunan berdasarkan konsultasi di antara negara anggota dan organisasi internasional terkait. Hasil dari diskusi dan kebijakan DEWG akan secara berkala dilaporkan kepada para pemimpin G20, menteri negara, dan *Sherpa* G20.

Prioritas dari Presidensi G20 harus menjadi dasar bagi langkah-langkah yang diambil oleh DEWG. DEWG juga perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan *Engagement Group* (EG), organisasi internasional, dan lingkup pekerjaan G20 lainnya. Dengan berkolaborasi dengan efektif, DEWG dapat memastikan kelangsungan dalam menangani isu-isu prioritas dalam ekonomi digital.

Kepemimpinan Indonesia dalam DEWG G20 2022

Pada Konvensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma Italia, Indonesia resmi menjadi Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Tema ini mencerminkan upaya global untuk mendorong pemulihan yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan pasca-pandemi COVID-19.

Sebagai negara berkembang pertama di Asia Tenggara yang memegang kepemimpinan G20, Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa agenda ekonomi digital menjadi prioritas dalam diskusi global. Dalam kapasitasnya sebagai presidensi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun agenda utama, memfasilitasi diskusi, serta mencapai kesepakatan di antara negara-negara anggota G20.

Sebagai komitmen Indonesia untuk menciptakan forum diskusi yang kolaboratif, memastikan setiap suara didengar, dan mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, Kementerian Kominfo dipercaya untuk mewakili Indonesia untuk mempersiapkan dan memimpin forum DEWG G20 2022. Forum DEWG dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Menkominfo, Mira Tayyiba, yang bertindak sebagai *Chair* DEWG, dengan Dr. Dedy Permadi, Staf Ahli Menkominfo, sebagai *Alternative Chair* DEWG. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dan pelaksanaan tugas yang optimal.

Chair DEWG bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan DEWG, mengkoordinasikan penyusunan agenda, serta memastikan terlaksananya keputusan-keputusan strategis. Dalam menjalankan tugasnya, *Chair* DEWG harus terbuka terhadap saran dan kritik dari negara anggota serta mampu merespon dengan bijak untuk meningkatkan kualitas diskusi dan hasil yang dicapai. *Alternative Chair* bertanggung jawab untuk mendukung *Chair* DEWG dalam tugas-tugas tersebut dan memimpin kegiatan-kegiatan DEWG bila diperlukan.²⁴

Dalam forum DEWG G20 2022, tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah

Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Literacy and Skills, serta Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Melalui pembahasan *Connectivity and Post-COVID-19 Recovery*, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperluas konektivitas digital dengan memperkuat infrastruktur serta meningkatkan akses internet. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama bagi sektor UMKM yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi.²⁵

Sementara itu, dalam isu *Digital Literacy and Skills*, Indonesia menitikberatkan upaya peningkatan literasi serta keterampilan digital guna memastikan partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital. Penguatan kompetensi ini menjadi krusial dalam mengatasi kesenjangan digital, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu di era transformasi digital.²⁶

Adapun dalam isu *Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust*, Indonesia mendorong tata kelola data lintas negara yang aman dan terpercaya, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data, privasi, serta kedaulatan digital. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan

²⁴ Global Conference. 2018. What is the Role of the Session Chair in a Conference? Diakses dari <https://globalconference.ca/what-is-the-role-of-the-session-chair-in-a-conference/>. (Diakses pada 10 Juni 2024).

²⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. Siaran Pers No. 86/HM/KOMINFO/03/2022 tentang Kick-off Meeting DEWG G20: Menkominfo

Tekankan Tiga Karakteristik Transformasi Digital. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/40573/siaran-pers-no-86hmkominfo032022-tentang-kick-off-meeting-dewg-g20-menkominfo-tekanan-tiga-karakteristik-transformasi-digital/0/siaran_pers. (Diakses pada 19 November 2024).

²⁶ Ibid.

ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara global.²⁷

Dengan memanfaatkan forum DEWG, Indonesia berupaya untuk mendorong kerjasama internasional dalam ketiga isu prioritas ini, sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi global dan memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai presidensi G20, Indonesia memiliki beberapa kepentingan strategis dalam DEWG. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat posisi ekonomi digital Indonesia di tingkat global dan meningkatkan daya saing industri digital nasional. Kepentingan ini didasarkan pada beberapa faktor utama:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui transformasi digital
2. Meningkatkan daya saing UMKM di era digital
3. Memastikan arus data lintas batas yang aman dan adil
4. Mendorong investasi dalam infrastruktur digital

Untuk memastikan kualitas substansi yang dibahas dalam persidangan DEWG, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng sejumlah institusi akademik terkemuka di Indonesia sebagai National Knowledge Partner. Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), serta Centre for Strategic and International Studies

(CSIS) Indonesia berperan aktif dalam menyusun materi yang menjadi dasar pembahasan selama forum berlangsung. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pendekatan berbasis penelitian dalam perumusan kebijakan digital yang lebih komprehensif.

Selain dukungan dari institusi nasional, Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mendapatkan perspektif global dalam pengambilan keputusan di DEWG. Beberapa lembaga yang berperan sebagai *Global Knowledge Partner* dalam forum ini antara lain International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), serta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keberadaan mitra global ini bertujuan untuk memperkaya pembahasan dengan wawasan serta pengalaman dari berbagai negara, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan dinamika ekonomi digital global.

Keberadaan mitra global ini tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun dalam DEWG memiliki dasar yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif, DEWG G20 2022 diselenggarakan dalam empat pertemuan utama yang berlangsung di berbagai lokasi di Indonesia. Setiap

²⁷ Ibid.

pertemuan memiliki agenda khusus yang berfokus pada tiga isu prioritas DEWG. Melalui serangkaian diskusi ini, negara-negara anggota G20 mengidentifikasi tantangan utama dalam ekonomi digital, seperti ketimpangan akses internet, kurangnya literasi digital, serta kompleksitas regulasi aliran data lintas negara.

Negosiasi yang berlangsung dalam forum DEWG bertujuan untuk menghasilkan dokumen kesepakatan yang disebut "*Bali Package*", yang menjadi rekomendasi kebijakan ekonomi digital global. *Bali Package* berisi prinsip-prinsip dasar terkait infrastruktur digital, literasi digital, dan tata kelola data yang lebih aman dan transparan. Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih adil bagi negara maju dan berkembang dalam pemanfaatan ekonomi digital.

Sebagai hasil akhir dari rangkaian pertemuan DEWG, *Bali Package* kemudian diajukan ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 di Bali untuk diratifikasi oleh para pemimpin dunia. Dokumen ini menjadi acuan bagi negara-negara G20 dalam menyusun kebijakan ekonomi digital di tingkat nasional dan internasional.

Strategi Diplomasi Indonesia dalam DEWG G20 2022

Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia menjalankan diplomasi digital untuk mengamankan kepentingan nasional, memperkuat kerja sama internasional, dan

memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam ekonomi digital global.

Indonesia menerapkan tiga strategi utama dalam diplomasi DEWG G20 2022:

1. Diplomasi Inklusif

Melibatkan akademisi, sektor swasta, dan organisasi global seperti ITU, UNESCAP, UNCTAD, dan OECD dalam perumusan kebijakan digital.²⁸

2. Diplomasi Multilateral

Metode diplomasi multilateral dijalankan Indonesia melalui partisipasi aktif dalam forum DEWG, dimana Indonesia mengedepankan kolaborasi antar negara anggota G20 untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, khususnya terkait isu prioritas DEWG.

3. Diplomasi Kompromi

Perumusan *Bali Package* menghadapi tantangan karena perbedaan kepentingan antar negara. Negara maju mengkhawatirkan fleksibilitas standar global, sementara negara berkembang menginginkan panduan yang lebih praktis. Untuk menjembatani perbedaan ini, Indonesia menerapkan diplomasi kompromi dengan mengadakan

²⁸ Jemadu, Liberty. 2022. Kominfo buka forum DEWG G20 pekan depan. Suara. Diakses dari

<https://www.suara.com/tekno/2022/03/11/183632/kominfo-buka-forum-dewg-g20-pekan-depan>. (Diakses pada 14 November 2024)

diskusi informal di luar sesi resmi, memungkinkan negosiasi lebih fleksibel sebelum diskusi formal berlangsung.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, Indonesia sukses merumuskan Bali Package sebagai dokumen konsensus yang merefleksikan kepentingan global, sekaligus memperkuat posisi DEWG sebagai forum strategis untuk kebijakan ekonomi digital global.

Kesepakatan dan Pencapaian dalam *Bali Package*

Sebagai Chair DEWG G20 2022, Indonesia memainkan peran strategis dalam merumuskan *Bali Package* yang mencakup tiga aspek utama: konektivitas digital, literasi digital, dan aliran data lintas batas. Paket ini bertujuan untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global maupun nasional.

Berikut evaluasi yang mencakup hasil pembahasan isu prioritas, relevansinya dengan target diplomasi, dan kepentingan nasional Indonesia:

1. Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca-COVID-19

Konektivitas digital menjadi elemen kunci dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Dalam DEWG, Indonesia mengarahkan diskusi untuk memastikan bahwa akses digital yang aman dan inklusif menjadi bagian dari transformasi ekonomi global. Hal ini tercermin dalam Poin 9-10 Bali Package, yang menekankan perlunya

infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau.

Secara nasional, isu ini mendukung inisiatif *Palapa Ring*, yang bertujuan menjembatani kesenjangan digital di wilayah terpencil serta membantu UMKM beradaptasi dengan ekonomi digital. Dengan memasukkan agenda ini ke dalam Bali Package, Indonesia tidak hanya berkontribusi terhadap pemulihan global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara.

2. Literasi Digital dan Keterampilan Digital

Peningkatan literasi digital menjadi agenda utama untuk memastikan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan dan komunitas pedesaan, dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. DEWG menghasilkan G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy, yang membantu negara anggota mengidentifikasi kesenjangan keterampilan digital. Kesepakatan ini dirangkum dalam Poin 16-17 Bali Package.

Di tingkat nasional, kebijakan ini sejalan dengan program *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang bertujuan meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Dengan mengintegrasikan inisiatif ini ke dalam Bali Package, Indonesia memastikan bahwa literasi digital tidak hanya menjadi agenda internasional tetapi juga bagian dari inklusi digital domestik.

3. Aliran Data Lintas Batas dan Keamanan Digital

Dalam DEWG, Indonesia menegaskan bahwa kerangka kerja aliran data harus mendukung perdagangan digital, sekaligus menjaga privasi dan keamanan data. Kesepakatan ini dituangkan dalam Poin 22-24 Bali Package, yang menekankan konsep *Data Free Flow with Trust*.

Di Indonesia, isu ini sangat relevan dengan pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022, yang menjadi langkah maju dalam tata kelola data nasional. Regulasi ini memastikan pengelolaan data pribadi yang lebih aman dan memperkuat kompatibilitas Indonesia.

Melalui *Bali Package*, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk melindungi keamanan data dan privasi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar global melalui platform digital.

4. Keberlanjutan Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu agenda utama dalam Bali Package, sebagaimana tercantum dalam Poin 18-19. Dokumen ini menegaskan pentingnya memberikan dukungan regulasi, infrastruktur, dan literasi digital bagi UMKM agar mereka dapat bersaing di pasar digital.

Sejalan dengan ini, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan seperti Gerakan Nasional Bangga

Buatan Indonesia (BBI) melalui Keppres No. 15 Tahun 2021 untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam platform digital. Selain itu, PP No. 7 Tahun 2021 memberikan insentif pajak dan akses keuangan bagi UMKM terdigitalisasi.

5. Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan

DEWG menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif, sebagaimana tertuang dalam Poin 13-15 Bali Package. Kesepakatan ini menegaskan bahwa layanan digital harus aman dan inklusif, dengan fokus pada pengentasan *digital divide*.

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperluas inklusi digital, termasuk pengembangan internet pedesaan dan pemberdayaan UMKM digital. Dengan menjadikan inklusivitas digital sebagai agenda utama Bali Package, Indonesia memperkuat upayanya dalam menciptakan transformasi digital yang merata.

6. Dukungan terhadap Kelompok Rentan

Salah satu capaian penting dalam DEWG adalah perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan komunitas pedesaan. Poin 17 Bali Package menegaskan perlunya akses digital yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Di tingkat nasional, program Digital Talent Scholarship (DTS) telah dirancang untuk

memberikan pelatihan digital bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan memasukkan isu ini dalam Bali Package, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam diplomasi digital yang inklusif.

7. Inovasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi

Bali Package juga menekankan pentingnya inovasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Poin 14. Forum DEWG mendorong promosi penelitian dan kolaborasi teknologi untuk mendukung pengembangan inovasi digital yang lebih luas.

Di Indonesia, isu ini relevan dengan berbagai inisiatif nasional dalam pengembangan AI, IoT, dan *blockchain*. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi terus dilakukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi.

Evaluasi *implementasi Bali Package* menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengintegrasikan kepentingan nasionalnya ke dalam kebijakan ekonomi digital global. Sejumlah kebijakan yang telah diadopsi, seperti penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan regulasi perlindungan data, mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun telah ada kemajuan dalam implementasi *Bali Package*, beberapa tantangan masih harus diatasi, seperti penyelarasan regulasi antar negara, penguatan keamanan data, serta pemerataan akses digital di wilayah terpencil. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan dan kerja sama internasional akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampak *Bali Package* bagi ekonomi digital Indonesia.

Proyeksi Implementasi Bali Package

Kesepakatan yang dihasilkan melalui DEWG G20 2022, sebagaimana tercermin dalam *Bali Package*, memberikan peluang strategis untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Beberapa aspek utama yang didukung oleh kesepakatan ini mencakup:

1. Potensi Penguatan Tata Kelola Digital Global

Kerangka *Data Free Flow with Trust* yang telah disepakati DEWG dalam *Bali Package*, menciptakan peluang untuk meningkatkan interoperabilitas regulasi antar negara, memperkuat perdagangan digital, dan memastikan keamanan data pribadi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan mengurangi hambatan regulasi lintas batas, memperkuat integrasi pasar global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital global.²⁹

²⁹ Larionova, M. (2023). G20 at the Critical Juncture: Indonesia's 2022 Presidency.

International Organisations Research Journal. Retrieved from

2. Transformasi Ekonomi Digital Domestik

Bagi Indonesia, kesepakatan terkait konektivitas digital dalam Bali Package membuka peluang untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital domestik. Investasi dalam jaringan 5G dan desa pintar diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital dan memperluas akses masyarakat terhadap teknologi digital. Selain itu, inisiatif ini akan mendorong UMKM untuk lebih kompetitif di pasar internasional melalui digitalisasi, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.³⁰

3. Dukungan Berkelanjutan terhadap Digitalisasi UMKM

DEWG G20 menegaskan komitmen untuk terus mendukung digitalisasi UMKM sebagai strategi utama pemulihan ekonomi. Upaya ini mencakup peningkatan akses internet di daerah terpencil, integrasi UMKM ke ekosistem e-commerce global, serta pemberian insentif bagi UMKM yang mengadopsi teknologi digital.

Selain itu, negara anggota G20 juga mendorong penguatan regulasi perlindungan data dan keamanan transaksi digital bagi UMKM guna memastikan kepercayaan dalam ekonomi digital. Dengan dukungan ini, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi pada ekonomi digital global, sejalan dengan prinsip inklusivitas *Bali Package*.

4. Pemajuan Inovasi Teknologi

Komitmen dalam Bali Package untuk mempromosikan penelitian dan inovasi teknologi dapat mempercepat pengembangan teknologi baru seperti AI dan *Internet of Things* (IoT). Indonesia berpotensi untuk menjadi pusat inovasi di kawasan Asia Tenggara, menciptakan peluang kerja baru, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.³¹

5. Peran Strategis Indonesia di Forum Internasional

Keberhasilan Indonesia dalam merumuskan *Bali Package* memperkuat reputasi negara sebagai pemimpin dalam diplomasi digital global. Dalam jangka panjang, Indonesia memiliki peluang untuk terus

https://iorj.hse.ru/data/2023/06/09/2016864237/2_Larionova.pdf, Hlm. 6-9. diakses pada 19 November 2024.

³⁰ Mildner, S. A. (2022). Sustainable Economic Recovery: G20 in Troubled Times. G20 in 2023: Priorities for India's Presidency. Diakses dari <https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-G20-in-2023-Priorities-for-Indias-Presidency.pdf#page=10>. Hlm. 10-12. (Diakses pada 19 November 2024)

³¹ Yoganandham, G. (2024). India's G20 Presidency Focuses on Economic Cooperation and Digital Public Infrastructure. ResearchGate. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/375999502_INDIA'S_G20_PRESIDENCY_FOCUSES_ON_ECONOMIC_COOPERATION_ON_DIGITAL_PUBLIC_INFRASTRUCTURE. Hlm. 5-8. (Diakses pada 19 November 2024).

memainkan peran strategis dalam forum G20 dan multilateralisme digital lainnya, memperjuangkan agenda digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.³²

Proyeksi jangka panjang dari kesepakatan DEWG G20 2022 menunjukkan bahwa *Bali Package* memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi digital global dan domestik. Dengan memanfaatkan peluang dari kesepakatan ini, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dan global dalam ekonomi digital, sambil memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan.

SIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi Indonesia. Dalam upaya pemulihan, Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 2022 untuk menempatkan digitalisasi sebagai agenda utama dalam DEWG.

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi secara efektif untuk memastikan kepentingan negara berkembang tetap terakomodasi dalam kebijakan ekonomi digital global. Hasilnya, *Bali Package* dirumuskan sebagai kerangka kerja bagi ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan aman.

Dari perspektif hubungan internasional, kebijakan digital

Indonesia didorong oleh kepentingan domestik dan dinamika global.

Keberhasilan Indonesia dalam memimpin DEWG menunjukkan pentingnya kerja sama multilateral dalam ekonomi digital. Selain itu, partisipasi komunitas epistemik, termasuk akademisi dan organisasi internasional, memperkuat perumusan kebijakan digital yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, A, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, Jurnal Brand, 2:1, Diakses dari <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>, Hlm. 123-130

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2023. Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Indonesia. Diakses dari <https://apjii.or.id>. (Diakses pada 20 Februari 2025)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2022. Survei Profil Internet Indonesia 2022, Diakses dari <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>, hlm. 10. (Diakses pada 25 Januari 2023)

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Pariwisata Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject>

³² Kaprisma, H. (2024). Cultural Diplomacy and Global Challenges in G20 Indonesia 2022. *International Review of Humanities*

Studies. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=irhs>. Hlm. 3-6. (Diakses pada 19 November 2024).

- /16/pariwisata.html. (Diakses pada 18 Februari 2025)
- Badan Pusat Statistik. 2023. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023. Berita Resmi Statistik No.35/05/Th. XXV, 5 Mei 2023. Hlm. 13
- Davis, S., Saini, S., Sipahimalani, R., Hoppe, F., Lee, W., Girona, IM., Choi, C., Smittinet, W, 2019. e-Conomy SEA 2019: Swipe up and to the right: Southeast Asia's \$100 billion internet economy. Google, Temasek & Bain Mobile, Consumer Insight. Diakses dari <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-conomy-sea-2019-swipe-up-and-to-the-right-southeast-asias-100-billion-internet-economy/>, Hlm. 4
- Dougherty. James E., Pfaltzgraff. Robert L, Jr, 1997, Contending Theories of International Relations, Happer and Row Publisher, New. York, hlm. 418
- G20 Information Centre. 2021. G20 Digital Economy Ministers Meeting Declaration 2021. Diakses dari <https://www.g20.utoronto.ca/2021/210805-digital.html#annex3>. (Diakses pada 18 Januari 2024).
- G20 Research Group. (2016). G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative, 2016 Hangzhou Summit. University of Toronto. Diakses dari G20 Information Centre: <http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-digital.html> (Diakses pada 17 April 2024)
- Global Conference. 2018. What is the Role of the Session Chair in a Conference? Diakses dari <https://globalconference.ca/what-is-the-role-of-the-session-chair-in-a-conference/>. (Diakses pada 10 Juni 2024).
- Google, Temasek, & Bain. 2022. E-Conomy SEA 2022 Report Highlights, https://services.google.com/fh/files/misc/indonesia_e_conomy_sea_2022_report.pdf, Hlm. 12 (diakses pada 19 Oktober 2023)
- Hermawan, Y. 2010. Formalizing the G20 outreaching contact groups and civil G20. Dalam Thomas , & P. Wolf, G20 and Global Development, Hlm. 32
- Haas, Peter M., 1992, Epistemic Communities and International Policy Coordination. International Organization. World Peace Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.
- Ibid.
- International Labour Organization. 2021. World Employment and Social Outlook: Trends 2021. <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/lang-en/index.htm>. Diakses pada 5 Oktober 2023.
- Jemadu, Liberty. 2022. Kominfo buka forum DEWG G20

- pekan depan. Suara. Diakses dari <https://www.suara.com/tekno/2022/03/11/183632/kominfo-buka-forum-dewg-g20-pekan-depan>. (Diakses pada 14 November 2024)
- K.J. Holsti, 1988, “Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis”, Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta, Airlangga, hlm. 652
- Kaprisma, H. (2024). Cultural Diplomacy and Global Challenges in G20 Indonesia 2022. *International Review of Humanities Studies*. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=irhs>. Hlm. 3-6. (Diakses pada 19 November 2024).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM hingga Pemerintah Daerah. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/0/berita>. (Diakses pada 31 Oktober 2023)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. Siaran Pers No. 86/HM/KOMINFO/03/2022 tentang Kick-off Meeting DEWG G20: Menkominfo Tekankan Tiga Karakteristik Transformasi Digital. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/40573/siaran-pers-no-86hmkominfo032022-tentang-kick-off-meeting-dewg-g20-menkominfo-tekankan-tiga-karakteristik-transformasi-digital/0/siaran_pers. (Diakses pada 19 November 2024).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>. Diakses pada 27 September 2023
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. Menko Airlangga: Pemerintah Inisiasi Berbagai Kebijakan Mendukung Pengembangan Talenta Digital. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4505/menko-airlangga-pemerintah-inisiasi-berbagai-kebijakan-mendukung-pengembangan-talenta-digital> (Diakses pada 28 November 2023)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. Berperan sebagai Akselerator

- Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking. Diakses dari ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung-kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking> (Diakses pada 28 November 2023)
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. 2022. Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita>, (Diakses pada 6 September 2023)
- Larionova, M. (2023). G20 at the Critical Juncture: Indonesia's 2022 Presidency. *International Organisations Research Journal*. Retrieved from https://iorj.hse.ru/data/2023/06/09/2016864237/2_Larionova.pdf, Hlm. 6-9. diakses pada 19 November 2024.
- Mildner, S. A. (2022). Sustainable Economic Recovery: G20 in Troubled Times. *G20 in 2023: Priorities for India's Presidency*. Diakses dari <https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-G20-in-2023-Priorities-for-Indias-Presidency.pdf#page=10>. Hlm. 10-12. (Diakses pada 19 November 2024)
- Putra, A. C. 2022. Pengaruh Pertumbuhan PDRB Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, Hlm. 139.
- Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Depok: Kenacana, Hlm. 187
- World Bank. 2023. GDP per capita (current US\$) - Indonesia. Diakses dari: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID&most_recent_year_desc=false&start=2016. (Diakses pada 28 Agustus 2023)
- Yoganandham, G. (2024). India's G20 Presidency Focuses on Economic Cooperation and Digital Public Infrastructure. *ResearchGate*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/375999502_INDIA'S_G20_PRESIDENCY_FOCUSES_ON_ECONOMIC_COOPERATION_DIGITAL_PUBLIC_INFRASTRUCTURE. Hlm. 5-8. (Diakses pada 19 November 2024).